

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ifan Arbiansa¹; M. Yusuf Bahtiar²; Ersi Sisdianto³

Universitas Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email : ifanarbiansa12@gmail.com¹; myusufbahtiar@radenintan.ac.id²;
ersisisdianto@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam selama periode 2015-2024. Menggunakan data panel dari 34 provinsi, analisis dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, disebabkan oleh celah dalam sistem perpajakan dan alokasi dana yang tidak merata. Sebaliknya, tingkat investasi menunjukkan pengaruh negatif signifikan, di mana investasi yang merata dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Pengeluaran pemerintah juga berpengaruh negatif tidak signifikan, sering kali tidak diarahkan secara optimal untuk redistribusi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ketimpangan ekonomi di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis yang mendalam dan juga di iringi dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci : Pajak; Investasi; Pengeluaran Pemerintah Dan Ketimpangan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax revenue, investment levels, and government spending on economic inequality in Indonesia from an Islamic economic perspective during the 2015-2024 period. Using panel data from 34 provinces, the analysis was conducted using multiple linear regression. The results indicate that tax revenue has an insignificant negative effect on economic inequality, caused by loopholes in the tax system and unequal allocation of funds. Conversely, investment levels show a significant negative effect, as equitable investment can create jobs and increase productivity. Government spending also has an insignificant negative effect, often not optimally directed towards redistribution. This study recommends reforms to taxation and government spending policies to increase their effectiveness in reducing economic inequality. These findings provide an important contribution to understanding the dynamics of economic inequality in Indonesia and offer policy recommendations based on in-depth analysis and Islamic economic values.

Keywords : Tax; Investment; Government Spending; and Economic Inequality

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan adalah cita-cita mendasar untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun kenyataannya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan ekonomi yang tinggi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur melalui Rasio Gini sempat mencapai angka 0,402 pada 2015 dan masih bertahan di angka 0,381 pada 2024, yang mengindikasikan bahwa distribusi

pendapatan belum menyebar rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif, namun hasil pembangunan belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pajak, investasi dan pengeluaran pemerintah adalah alat penting untuk mengatasi ketimpangan ini. Namun, sistem perpajakan di Indonesia lebih mengandalkan pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang kurang progresif, sementara pajak langsung seperti pajak penghasilan yang lebih adil masih rendah. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi yang tidak tepat sasaran tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan, sehingga reformasi untuk mengurangi subsidi energi dan meningkatkan belanja sosial, seperti bantuan tunai dan asuransi kesehatan, menjadi fokus kebijakan untuk mengurangi kesenjangan (Asri & Suseno, 2023).

Ketimpangan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, di antaranya penerimaan pajak, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak yang optimal seharusnya mampu mendorong redistribusi kekayaan melalui belanja sosial dan pembangunan infrastruktur yang merata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, 2020). Namun, realitasnya menunjukkan bahwa pajak yang dikumpulkan masih belum sepenuhnya diarahkan untuk mengurangi disparitas pendapatan. Di sisi lain, tingkat investasi yang tinggi umumnya hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu seperti Jawa dan Sumatra, sehingga memperlebar kesenjangan dengan daerah lain (Burgess et al., 2020).

Masalah kesenjangan ini akan lebih kompleks jika menekankan nilai-nilai seperti keadilan dalam distribusi, keseimbangan serta mengutamakan mustadh'afin (kaum lemah), yang termasuk dalam perspektif ekonomi Islam. Ketimpangan ekonomi yang terus terjadi tidak hanya bertentangan dengan prinsip maqashid al-syariah dalam aspek hifdz al-mal (menjaga harta), tetapi juga dapat menghambat tercapainya kesejahteraan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana kaitan antara penerimaan pajak, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam kerangka nilai-nilai ekonomi Islam (Wahyudi, 2023).

Penerimaan pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan redistribusi pendapatan (Mellisayah, 2025). Berbagai program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (Nusiantari & Swasito, 2020). Dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 Pajak diartikan sebagai Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nuriyah & Sisdianto, 2024). Kebijakan perpajakan yang tidak adil dapat memperburuk ketimpangan, sehingga perlu ada

evaluasi dan reformasi dalam sistem perpajakan (Drieandita & Santoso, 2023), Dalam penelitian lain penerimaan pajak dapat menurunkan ketimpangan jika diiringi dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran (Zai et al., 2024).

Tingkat investasi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Peluang kerja dan peningkatan efisiensi ekonomi dapat terwujud melalui distribusi investasi yang merata (Gam et al., 2023). Meskipun, data menunjukkan bahwa investasi cenderung terkonsentrasi di pulau Jawa, yang memperparah ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah (Maesza et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata diharapkan tercapai melalui investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya, investasi perlu didorong di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. (Gai et al., 2024).

Pengeluaran pemerintah merupakan alat penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Melalui belanja untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah dapat meningkatkan akses dan kesempatan bagi masyarakat yang kurang beruntung (Ahyani et al., 2023). Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan masih dipertanyakan, terutama terkait dengan perencanaan dan pengawasan program-program sosial (Safa Adhytia Putri, 2019). Wilayah yang lebih berkembang cenderung menerima alokasi dana bansos yang lebih banyak, sementara daerah terpencil dan tingkat kemiskinan tinggi sering kali menghadapi kekurangan dana atau hambatan dalam distribusinya (Aliyah et al., 2025). Penelitian terbaru menunjukkan pajak dan pengeluaran fiskal berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski di beberapa periode tertentu belanja negara berdampak negatif dan perlu dioptimalkan (Aslamiyah, 2024). Di sisi lain, Kontribusi pendanaan perbankan syariah terbukti memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu jangka panjang, walaupun pengaruhnya belum terlihat signifikan dalam jangka pendek (Risidiana Himmati et al., 2024).

Pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan besar, salah satunya mengenai ketimpangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, disparitas pendapatan antarwilayah dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun angka kemiskinan menurun, data BPS (Badan Pusat Statistik) memperlihatkan bahwa ketimpangan (indeks Gini) masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa Distribusi hasil pertumbuhan ekonomi masih belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat secara seimbang, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik (Edelweis Bunga Gunung et al., 2023).

Berbagai studi, baik di level nasional maupun daerah, telah banyak membahas faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi, yang umumnya menyoroti indikator-indikator makroekonomi seperti penerimaan pajak, belanja pemerintah, dan investasi. Sebagian besar studi sebelumnya menitikberatkan pada pendekatan ekonomi konvensional, yang mengukur dampak ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan secara agregat tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Hal ini menjadikan perbedaan pemahaman mengenai peran nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, serta perhatian terhadap kelompok rentan berpengaruh pada efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data *time series* nasional tanpa menggali dinamika antarprovinsi, padahal ketimpangan ekonomi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup tajam antarwilayah. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menggunakan pendekatan data panel yang menggabungkan dimensi waktu dan spasial (provinsi) agar dapat menangkap ketimpangan secara lebih akurat dan kontekstual.

Di sisi lain, masih terbatas studi yang secara empiris menguji efektivitas distribusi pajak dan belanja pemerintah dalam konteks sistem fiskal Indonesia yang plural, serta minimnya integrasi indikator ekonomi Islam dalam pengukuran dan analisisnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif data panel dan landasan normatif dari ekonomi Islam, sekaligus menyajikan analisis berdasarkan kondisi 34 provinsi selama periode 2015-2024. Hal ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya literatur akademik dan menawarkan rekomendasi kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Penelitian ini ditujukan agar dapat melihat dampak penerimaan pajak, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan data panel mulai tahun 2015 hingga 2024, diharapkan dapat menghasilkan bukti ilmiah sehingga bisa menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adil dan efektif. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana interaksi antara ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hasil analisis (Fadillah et al., 2024).

Penelitian ini menghadirkan kebaruan utama berupa integrasi antara pendekatan empirik data panel provinsi (2015-2024) dengan kerangka normatif ekonomi Islam, yang belum banyak dilakukan dalam studi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Meskipun studi terdahulu seperti Sari & Qibthiyyah 2022 telah menguji hubungan antara penerimaan pajak dan ketimpangan pada level provinsi, mereka tidak memasukkan nilai-nilai ekonomi Islam. (Sari & Qibthiyyah, 2022).

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah terhadap upaya pencapaian pembangunan yang adil dan inklusif, baik dari sisi teori maupun praktik. Secara teori, temuan studi ini menambah pemahaman tentang keterkaitan antara penerimaan pajak, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi. Sementara secara praktis, Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia (Syarif, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Distribusi Pendapatan Keynesian

Teori distribusi pendapatan dalam kerangka Keynesian menyoroti bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan bukanlah hasil alami dari mekanisme pasar, tetapi merupakan konsekuensi dari implementasi kebijakan publik yang belum ideal (Ary Fakturrachman Aryansyah, 2025). John Maynard Keynes (1936) menegaskan bahwa dalam kondisi resesi, pasar tidak selalu dapat memulihkan diri secara otomatis melalui mekanisme *invisible hand*, sehingga negara perlu mengambil peran aktif melalui intervensi fiskal (N. Gregory Mankiw, 2020). Pendekatan Keynesian memberikan pijakan normatif untuk memahami bahwa ketimpangan dapat dicegah atau dipertajam tergantung pada desain kebijakan pemerintah (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021). Menurut Keynes dalam "*General Theory of Employment*", Karena pasar tidak selalu dapat mencapai kondisi seimbang, peran pemerintah diperlukan untuk mengarahkan distribusi sumber daya agar lebih tepat dan merata (Maria Anita Titu, 2023). Ketimpangan ekonomi merujuk pada kondisi di mana pendapatan dan kekayaan tersebar secara tidak seimbang di antara individu atau kelompok pada masyarakat. Ketimpangan ini menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, peluang, serta kesejahteraan (Tadjoeddin et al., 2017).

Rochmat Soemitro Menjelaskan mengenai pengeluaran negara untuk kepentingan umum dibiayai melalui pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib dari rakyat untuk kas negara serta bersifat memaksa yang di atur undang-undang dan tanpa imbalan secara langsung (Ariffin & Sitabuana, 2022). Salah satu pilar utama teori Keynesian adalah konsep pajak progresif sebagai instrumen redistributif. Pajak yang dikenakan dengan persentase lebih besar pada kelompok berpenghasilan tinggi efektif mengurangi kesenjangan, karena dana pajak tersebut dapat dikembalikan melalui belanja sosial, subsidi atau program kesejahteraan (Barbieri Góes, 2020). Studi empiris juga mengonfirmasi bahwa pajak progresif dapat bertindak sebagai *automatic stabilizer* yakni meredam fluktuasi ekonomi dan ketimpangan sosial secara otomatis (Hall & Way, 2019). Konsep Keynesian juga didukung bahwa efek pajak terhadap ketimpangan tidak signifikan yang kemungkinan disebabkan oleh sistem perpajakan yang belum cukup progresif atau belum efisien mengalokasikan dana ke kelompok rentan (Hariyono Hariyono, 2024).

Hal lain yang diperkuat oleh pendekatan Keynesian adalah pentingnya investasi publik dan swasta dalam menciptakan pertumbuhan inklusif. Budi Untung dalam kamus hukum ekonomi dan kamus ekonomi, Investasi dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan melalui penempatan dana atau modal dalam jangka waktu tertentu (Putri Ramadhani et al., 2022). Untuk mengurangi kesenjangan sosial dan regional, penting dilakukan investasi merata pada infrastruktur dan program sosial agar layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi dapat diakses secara adil (Edison & Andriansyah, 2023). Metode ini sejalan dengan pemikiran Keynesian bahwa investasi publik yang terarah ke wilayah tertinggal turut berfungsi sebagai alat redistributif serta meningkatkan efisiensi ekonomi.

Selain pajak dan tingkat investasi, pengeluaran pemerintah dapat menjadi instrumen penting lainnya. Menurut Sukino Pengeluaran pemerintah adalah total pengeluaran yang termasuk konsumsi dan investasi. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran atas barang modal, barang konsumsi, dan jasa. Pengeluaran ini digunakan untuk mendanai operasi pemerintah pusat maupun daerah serta pelaksanaan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Irfan Hamdani et al., 2023). Menurut Keynesian, pengeluaran publik terutama dalam sektor infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan juga dapat meningkatkan akses ekonomi masyarakat miskin dan memperluas kesempatan kerja (Alamanda, 2019). Di berbagai negara, peningkatan belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terbukti efektif mengurangi ketimpangan secara signifikan (Isiaka et al., 2022). Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada orientasi dan efisiensi belanja, jika hanya dialokasikan untuk belanja rutin atau subsidi yang tidak tepat sasaran maka dampaknya terhadap pemerataan tidak optimal (Waty et al., 2023).

Akhirnya, teori Keynesian memberikan kerangka kritis terhadap asumsi klasik bahwa pasar akan secara otomatis mencapai keseimbangan yang adil. Keynes menegaskan bahwa tanpa intervensi negara, ketimpangan dapat melebar karena struktur modal yang timpang dan akses ekonomi yang tidak merata (Gokan & Turnovsky, 2025).

Ketimpangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ketimpangan ekonomi merupakan persoalan kompleks yang dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam seperti kondisi wilayah dan sumber daya alam, maupun faktor manusia seperti ketimpangan pembangunan antar daerah (Ihwan Sugiarto, 2025). Di Indonesia, perbedaan potensi dan pemanfaatan sumber daya antarwilayah memperparah ketimpangan tersebut. Dalam pandangan ekonomi Islam, pembangunan ekonomi seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan. Instrumen seperti zakat, infaq dan sadaqah menjadi solusi penting dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kapasitas

manusia, perlindungan lingkungan dan terciptanya keadilan sosial sebagai bagian dari maqashid Syariah (Arifin, 2024). Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin yang terus melebar menunjukkan belum optimalnya peran negara dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan, khususnya dalam aspek keadilan sosial. Pembahasan tersebut ditegaskan pada QS. Al-Hasyr ayat 7, yaitu sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

artinya : *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan ah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Ayat ini menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, kekayaan harus didistribusikan secara adil agar tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang kaya saja, sehingga mendukung pemerataan dan kesejahteraan bersama (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2019).

Hipotesis

Pengaruh penerimaan pajak terhadap ketimpangan ekonomi

Penerimaan pajak diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi, artinya semakin besar penerimaan pajak negara, maka ketimpangan ekonomi cenderung menurun. Hal ini karena pajak berfungsi sebagai alat distribusi ulang pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah, terutama jika hasil pajak digunakan untuk program sosial, pendidikan dan kesehatan. Beberapa penelitian terdahulu seperti oleh Septiniat Zai, Ani Susanti Sabailaket (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat menurunkan ketimpangan jika diiringi dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak (yang setara dengan dharibah dalam kondisi tertentu) dapat digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam (Zai et al., 2024).

H1 : Penerimaan Pajak berpengaruh Negatif terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2015-2024.

Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi

Tingkat investasi diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi, yaitu jika tingkat investasi lebih tinggi pada suatu negara, maka ketimpangan ekonomi cenderung menurun. Hal ini karena Investasi berperan penting untuk membuka lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, terutama jika

investasi tersebut tersebar merata di berbagai sektor dan wilayah. Penelitian oleh Pratama Maesza, Guntur Eko Saputro, Panji Suwarno (2024). Menemukan bahwa peningkatan investasi berperan dalam memperbaiki distribusi pendapatan di Indonesia, terutama melalui sektor industri dan infrastruktur. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi yang produktif dan tidak mengandung unsur spekulasi (gharar) adalah bagian dari aktivitas muamalah yang dianjurkan karena dapat memperluas manfaat ekonomi dan mengurangi kesenjangan (Maesza et al., 2022).

H2 : Tingkat Investasi berpengaruh Negatif terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2015-2024.

Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi

Pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor perpajakan, diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi. Secara teori, penerimaan pajak yang maksimal dapat dimanfaatkan untuk mendukung program sosial dan juga pembangunan dengan tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada struktur dan alokasi dari pendapatan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa total penerimaan pajak di Indonesia belum secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar provinsi. Hal ini disebabkan oleh struktur pajak yang masih didominasi oleh pajak konsumsi yang bersifat regresif serta alokasi belanja yang belum sepenuhnya menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan distributif menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata untuk mencapai kesejahteraan bersama (Sari & Qibthiyyah, 2022).

H3 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Positif terhadap ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2015-2024.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Jenis Penelitian

Penelitian ini berbasis data numerik digunakan karena seluruh variabel bersumber dari data makroekonomi tahunan yang bersifat kuantitatif maka dalam penelitian ini lebih tepat memakai pendekatan kuantitatif, Pendekatan kualitatif dinilai kurang sesuai karena tidak dapat menggambarkan secara numerik seberapa besar kontribusi tiap variabel terhadap ketimpangan ekonomi.

Pendekatan kuantitatif yaitu metode ilmiah yang menganggap realitas dapat diukur, diamati dan dikategorikan. Hubungan antar variabel bersifat sebab-akibat, dengan data berupa

angka-angka yang dianalisis secara statistik (Sirilius Seran, 2020), Data sekunder diambil dari sumber resmi seperti BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015-2024. Data penelitian ini berupa data panel yang berfokus pada 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel bebas (penerimaan pajak, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah) terhadap variabel terikat (ketimpangan ekonomi).

Untuk mendukung validitas data penelitian ini maka dilakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya seluruh hasil analisis akan diinterpretasikan dalam kerangka nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, keberpihakan fiskal dan pengurangan kesenjangan (al-‘adl dan maqashid syariah).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti dan disimpulkan oleh peneliti (Aziz Alimul Hidayat, 2021). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wilayah administratif tingkat provinsi di Indonesia, yaitu data penerimaan pajak, tingkat investasi, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan ekonomi di 34 provinsi Indonesia yang tercatat secara resmi sejak tahun 2015-2024. Pemilihan populasi ini didasarkan pada tujuan penelitian yang memerlukan analisis data pada tingkat provinsi

Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan *pendekatan purposive sampling* (Sandu Siyoto, 2015). Teknik ini dipilih karena data yang dianalisis bersifat sekunder dan agregat, berasal dari sumber resmi seperti BPS dan DJPK, dengan unit analisis berupa 34 provinsi di Indonesia selama 2015-2024. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data untuk variabel yang diteliti, yaitu pajak, investasi, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan ekonomi.

Penggunaan *purposive sampling* dianggap tepat karena tidak semua provinsi memiliki data lengkap dan konsisten dalam periode tersebut. Oleh karena itu, hanya provinsi yang memenuhi syarat berikut yang dijadikan sampel: (1) data tersedia lengkap untuk semua variabel, (2) bersumber dari lembaga resmi, (3) faktor-faktor yang jarang diteliti secara bersamaan dan secara teoritis dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat terhadap ketimpangan ekonomi. Teknik ini memungkinkan peneliti fokus pada kualitas, kesesuaian data dan aspek baru, bukan pada representasi acak.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah regresi data panel yang diolah dengan bantuan program *E-views12* (Idah Zuhroh, 2021) analisis ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Pengaruh dianggap signifikan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Untuk menganalisis hubungan tersebut, digunakan model ekonometrika berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X^1_{it} + \beta_2 X^2_{it} + \beta_3 X^3_{it} + e_{it}$$

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistic Deskriptif

Pada tabel 1 menyajikan data statistik deskriptif 34 Provinsi di negara Indonesia pada tahun 2015-2024. Ketimpangan ekonomi memperoleh nilai minimum 0.235000, maksimum 0.477000, rata-rata 0.348488 dan standar deviasi 0.039786. Karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, maka data tersebar merata. Standar deviasi mencerminkan penyimpangan, sehingga distribusi data cenderung normal dan bebas dari bias. Selanjutnya, X_1 memiliki nilai rata-rata 10123.22 dan standar deviasi 26539.97, Karena nilai rata-rata tidak lebih besar dari nilai standar deviasi maka data tidak tersebar merata. Kemudian X_2 memiliki nilai rata-rata 11509.15 dan standar deviasi 17142.34, Karena nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi maka data tidak tersebar merata. Lalu X_3 memiliki nilai rata-rata 29894.73 dan standar deviasi 25708.41, Karena nilai rata-rata lebih besar dibanding nilai standar deviasi maka data tersebar merata.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada data panel mencakup uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tujuannya adalah memastikan model regresi memenuhi syarat dasar agar hasil analisis valid dan dapat dipercaya (Dr. Hamdi Agustin, 2023).

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, menyatakan bahwa nilai korelasi harus lebih kecil dari pada 0,90. Apabila lebih kecil dari 0,90 maka dinyatakan terbebas dari multikolinearitas atau lolos dari uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel 2 nilai Koefisien korelasi penerimaan pajak (X_1) dan tingkat investasi (X_2) sebesar $0,3375 < 0,90$, Penerimaan pajak (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_3) sebesar $0,0841 < 0,90$ serta tingkat investasi (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) sebesar $0,5605 < 0,90$. Maka ditarik kesimpulan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3, dalam data panel yang umum digunakan yaitu heteroskedastisitas, standarnya nilai Probabilitas $> 0,05$. Dapat dilihat nilai Probabilitas x_1 , x_2 dan $x_3 > 0,05$ Maka terbebas dari nilai heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Data Panel

Common Effect Model (CEM)

Common effect model (CEM) adalah Pendekatan awal yang paling sederhana dalam mengolah data panel. Model ini menggabungkan antara data *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antar individu atau antar waktu. Estimasi dalam model ini dilakukan menggunakan metode *Ordinary least square* (OLS) yang berfungsi untuk meminimalkan jumlah kuadrat galat (Zulfikar Bagus Pambuko, 2023).

Langkah awal dalam metode CEM adalah menyatukan antara data *time series* dan *cross section*. Selanjutnya, model diestimasi dengan OLS untuk melihat hubungan umum antara variabel bebas dan terikat tanpa mempertimbangkan perbedaan antar entitas atau waktu. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4 (CEM) didapatkan koefisien penerimaan pajak sebesar -1.214556 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1591, selanjutnya koefisien tingkat investasi sebesar 3.675677 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0192 dan koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 1.173107 dengan nilai probabilitas sebesar 0.2457.

FEM (*Fixed Effect Model*)

Tahap kedua dalam analisis data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), yang memperhitungkan perbedaan karakteristik spesifik antar individu (*cross-section*) atau antar periode waktu yang tidak dapat diamati namun dianggap tetap (*fixed*). Model ini memungkinkan adanya variabel *dummy* yang mewakili perbedaan tersebut (Zulfikar Bagus Pambuko, 2023). Estimasi pada FEM dapat dilakukan dengan metode LSDV (*Least square dummy variable*) atau *transformasi within effect* untuk menghilangkan variabel dummy. Dibandingkan CEM, FEM memberikan hasil yang lebih detail dan akurat karena memperhitungkan perbedaan khas pada tiap entitas.

Pada tabel 5 (FEM) didapatkan hasil koefisien penerimaan pajak sebesar -3.237608 dengan nilai probabilitas 0.8700, Kemudian koefisien tingkat investasi bernilai -3.671207 dengan probabilitas sebesar 0.0388 dan koefisien pengeluaran pemerintah bernilai -3.048007 dengan probabilitas sebesar 0.1197.

Uji Chow

Uji Chow diperlukan untuk mengetahui apakah model yang paling tepat digunakan adalah CEM atau FEM dalam analisis data panel. Uji ini membantu mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik individu atau waktu yang harus diperhitungkan dalam model (Dr. Hamdi Agustin, 2023):

H0 : CEM

H1 : FEM

Kriteria:

Jika nilai Prob > 0,05 maka H0 diterima

Jika nilai Prob < 0,05 maka H1 diterima

Dari perolehan uji Chow yang ditampilkan pada tabel 6, nilai probabilitas (Prob) *Cross-section Chi-square* dan *Cross-section F* sebesar 0.0000 (< 0.05). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Jadi model estimasi yang lebih tepat digunakan dalam regresi data panel adalah FEM.

Karena perolehan uji Chow menunjukkan FEM lebih tepat daripada CEM, langkah berikutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM. Sebelum uji Hausman dilakukan, regresi dengan pendekatan REM dijalankan terlebih dahulu sebagai dasar pengujian.

REM (*Random Effect Model*)

Setelah uji Chow, data dianalisis menggunakan REM untuk dibandingkan dengan FEM. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 7 REM didapatkan hasil koefisien penerimaan pajak sebesar -4.318708 dengan probabilitas 0.7649, selanjutnya koefisien tingkat investasi sebesar -2.354507 dengan nilai probabilitas 0.1569 dan koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -2.481208 dengan nilai probabilitas 0.8692.

Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan menentukan model mana yang lebih tepat digunakan antara REM atau FEM. Adapun hipotesis yang ditentukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 : REM

H_1 : FEM

Kriteria:

Jika nilai Prob $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai Prob $< 0,05$ maka H_1 diterima

Berdasarkan uji Hausman yang ditampilkan pada tabel 8, nilai Probabilitas adalah 0,0041 (kurang dari 0,05). Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan untuk regresi data panel adalah FEM.

Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak memiliki nilai koefisien sebesar -3.237608 dan nilai probabilitas 0.8700, Penerimaan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan dikarenakan probabilitasnya > 0.05 , yang artinya ketika Penerimaan Pajak meningkat maka ketimpangan ekonomi menurun namun tidak signifikan. Lalu Pengeluaran Pemerintah mendapatkan nilai koefisien sebesar -3.048007 dan nilai probabilitas 0.1197, Jadi Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan dikarenakan probabilitasnya > 0.05 , yang artinya ketika Pengeluaran Pemerintah meningkat maka ketimpangan ekonomi menurun namun tidak signifikan. Sedangkan Tingkat Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan nilai

koefisien sebesar -3.671207 dan nilai probabilitas 0.0388, yang artinya ketika Tingkat Investasi meningkat maka ketimpangan ekonomi menurun signifikan.

Pengaruh Penerimaan pajak Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia tahun 2015-2024

Penerimaan pajak memiliki hasil negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2015-2024 yang telah menjadi fokus penelitian. Penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan struktur dan implementasi sistem perpajakan. Pertama, adanya celah dalam sistem perpajakan memungkinkan individu dan perusahaan besar untuk menghindari kewajiban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang kompleks, seperti *tax planning* dan *transfer pricing*. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk program redistribusi pendapatan menjadi berkurang. Selain itu, alokasi dana pajak yang tidak merata juga berkontribusi pada ketimpangan. Banyak program belanja perpajakan lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, seperti konglomerat, daripada masyarakat miskin, sehingga mengurangi efektivitas upaya redistribusi. Oleh karena itu, Meski pajak bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi, berbagai faktor struktural dan perilaku dalam sistemnya membuat dampaknya kurang signifikan. Reformasi dalam kebijakan perpajakan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan redistribusi yang lebih efektif. oleh Septiniat Zai, Ani Susanti Sabailaket (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat menurunkan ketimpangan jika diiringi dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak (yang setara dengan *dharibah* dalam kondisi tertentu) dapat digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam (Zai et al., 2024).

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang penerimaan pajak dan ketimpangan ada pada surah At-Taubah Ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*yang memerlukan pertolongan*), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat ini menerangkan distribusi dana zakat ke delapan golongan mustahik, yang secara langsung menyalurkan dana ke kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi seperti fakir, miskin

dan gharimin (orang yang berutang). Pada konteks modern, zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penerimaan pajak, khususnya jika dikelola oleh Pemerintah.

Pengaruh Tingkat Investasi terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2024

Tingkat investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi, seperti menurut teori Harrod-Domar, investasi berperan dalam mendorong produktivitas dan menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat membantu mengurangi ketimpangan. Dampak ini akan lebih terasa jika investasi tersebar merata di berbagai sektor dan wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peran pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Keuangan, Bappenas dan instansi terkait lainnya sangat penting dalam merumuskan kebijakan investasi yang selaras dengan upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di masyarakat (Maesza et al., 2022).

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung membahas investasi atau ketimpangan ekonomi, ada beberapa ayat menjelaskan betapa penting keadilan, kerja keras dan tanggung jawab sosial. Salah satu ayat yang relevan adalah: Surah Al-Baqarah (2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Berdasarkan pemahaman ekonomi Islam, investasi bukan untuk mencari keuntungan finansial semata, namun memiliki dimensi sosial dan moral. Ayat ini mengajarkan bahwa harta (termasuk modal investasi) harus digunakan untuk kebaikan dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Ketika investasi diarahkan ke sektor-sektor riil seperti pertanian, UMKM atau infrastruktur sosial, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas khususnya kelompok bawah yang rentan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2024

Pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan efektivitas dan alokasi sumber daya dalam kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah seharusnya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan melalui program-program sosial, subsidi dan investasi infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah sering kali tidak diarahkan secara optimal

untuk mencapai tujuan redistribusi yang diinginkan. Misalnya, alokasi dana yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur di daerah perkotaan dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan, yang sering kali lebih rentan terhadap ketimpangan. Secara teori, penerimaan pajak yang optimal bisa digunakan untuk membiayai program-program sosial maupun pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada struktur dan alokasi dari pendapatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh struktur pajak yang masih didominasi oleh pajak konsumsi yang bersifat regresif serta alokasi belanja yang belum sepenuhnya menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan distributif menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata untuk mencapai kesejahteraan bersama (Sari & Qibthiyyah, 2022).

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menegaskan pentingnya keadilan sosial, tanggung jawab pemerintah dan pengelolaan harta yang baik. Meskipun tidak secara langsung membahas pengeluaran pemerintah, prinsip-prinsip ini dapat dihubungkan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi. Sama halnya dengan ayat yang berkaitan dengan penerimaan pajak surah At-Taubah Ayat 60 juga relevan terhadap pentingnya pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan juga merata.

Surah At-Taubah Ayat 60 memberikan kerangka normatif mengenai pentingnya pendistribusian kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Jika dikontekstualisasikan dalam kebijakan fiskal, ayat ini mengisyaratkan bahwa pengeluaran pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong pemerataan ekonomi, khususnya dengan memprioritaskan masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, intervensi fiskal negara bukan hanya berfungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menekan ketimpangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penerimaan pajak, tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia dari 2015 hingga 2024. Hasil menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan, sementara tingkat investasi berpengaruh negatif signifikan, yang berarti investasi yang merata dapat mengurangi ketimpangan. Pengeluaran pemerintah juga berpengaruh negatif tidak signifikan karena faktor tidak diarahkan dengan optimal. Dengan demikian variabel Tingkat Investasi merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2024, sementara kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah perlu direformasi agar lebih progresif, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan

wawasan penting dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

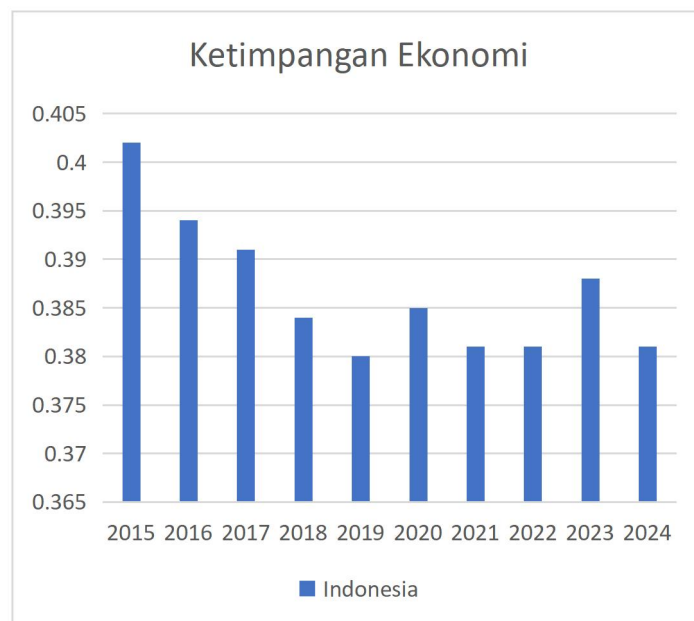
DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. (2019). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Magistra Insania Press.
- Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The Relevance of Allocation and Distribution of Income in The Islamic Economic Perspective in Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 19–40. <https://doi.org/10.32678/ije.v14i1.329>
- Alamanda. (2019). *Panel Data Analysis from 33 Provinces in Indonesia The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty*. August.
- Aliyah, T., Bahtiar, M. Y., & Zulaikah. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial , Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05(2), 491–508.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Arifin, Z. (2024). *Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam* (C. E. Muhamad Rizal Kurnia, M.E. (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Ary Fakturrachman Aryansyah. (2025). *DASAR-DASAR TEORI INFLASI: DARI PEMIKIRAN KLASIK HINGGA KEYNESIAN*. Penerbit Widina.
- Aslamiyah, S. (2024). Bridging the gap: evaluating Indonesia's national income and societal welfare through an Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 6(1), 23–44. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.1.20358>
- Asri, S. A. C., & Suseno, D. A. (2023). The Effect of Value-Added Tax Policy on Per Capita Income and Inequality in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 26(2), 220–235. <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i2.3526>
- Aziz Alimul Hidayat. (2021). *Cara Mudah Menghitung Besar Sampel*. Geger Sunten.
- Barbieri Góes, M. C. (2020). Personal Income Distribution and Progressive Taxation in a Neo-Kaleckian Model: Insights from the Italian Case. *Review of Political Economy*, 32(4), 615–639. <https://doi.org/10.1080/09538259.2020.1821999>
- Burgess, M., Enzle, M. E., & Morry, M. (2020). The social psychological power of photography: Can the image-freezing machine make something of nothing? In *European Journal of Social Psychology* (Vol. 30, Issue 5, pp. 613–630). [https://doi.org/10.1002/1099-0992\(200009/10\)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j](https://doi.org/10.1002/1099-0992(200009/10)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j)
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. (2020). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2020*. 10–23.
- Dr. Hamdi Agustin. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Konsep Dan Contoh penelitian)* (Hanny Novindaning Tyas (ed.)). Cv. Mega Press Nusantara.
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 269–276. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.04>
- Edelweis Bunga Gunung, David Setiawan, & Muhammad Yasin. (2023). Menganalisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2),

- 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Gai, A. M., Arpan, Y., Poerwati, T., & Sir, M. M. (2024). *Ekonomi Pembangunan: Teori Dan Praktik Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global*.
- Gam, T. T. H., Oanh, D. L. K., & Dang, N. M. B. (2023). The impact of foreign direct investment on income inequality in developing countries: The Bayesian approach. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(1), 127–143. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i1.18164>
- Gokan, Y., & Turnovsky, S. J. (2025). Government Spending, Debt Management, and Wealth and Income Inequality in a Growing Monetary Economy*. *Journal of Money, Credit and Banking*, 57(1), 185–221. <https://doi.org/10.1111/jmcb.13049>
- Hall, S., & Way, M. (2019). *University of Hawai`i at Mānoa Department of Economics Working Paper Series Working Paper No. 19-2 Progressive Taxation, Nominal Wage Rigidity, and Business Cycle Destabilization By Miroslav Gabrovski Jang-Ting Guo Progressive Taxation, Nominal Wa. 19*.
- Hariyono Hariyono. (2024). *Dasar-Dasar Ekonomi : Teori, Konsep & Perkembangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Idah Zuhroh, F. A. (2021). *Ekonometrika Dengan Soft Eviews*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ihwan Sugiarto. (2025). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. CV. Intake Pustaka.
- Irfan Hamdani, Nugia Sri Nesta, Junita Rahmawati, & Faisal Hidayat. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 187–203. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.902>
- Isiaka, A., Mihailov, A., & Razzu, G. (2022). *Reallocating Government Spending to Reduce Income Inequality: Panel Data Evidence from the Middle-Income Countries*.
- Maesza, P., Saputro, G. E., & Suwarno, P. (2022). Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan. *Jurnal Cafetaria*, 3(1), 130–140.
- Maria Anita Titu. (2023). *PENGANTAR ILMU EKONOMI*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Mellisyah. (2025). *Advances in Taxation Research Tax Policies and Economic Growth : A Comparative Review*. 3(1), 1–14.
- N. Gregory Mankiw. (2020). *Makro Ekonomi Edisi 6* (suryadi saat Wibi hardani, devri barnadi (ed.)). PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nuriyah, & Sisdianto. (2024). Analisis Terkait Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Media Akademik*, 2(4), 1–12.
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). Efficiency of Islamic Income Allocation and Distribution among MSMEs in Pentol Bakar Pacet, Mojokerto. *Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133–158, 15(01), 133–158.
- Nusiantari, D., & Swasito, A. P. (2020). Peran Penerimaan Pajak Dalam Usaha Pemerataan Pendapatan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.670>
- Putri Ramadhani, A., Afifah Septyasari, I., Nur Hasannah, F., & Kustiawati, D. (2022). Investasi ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(12), 1579–1589. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i12.746>
- Risdiana Himmati, Badara Shofi Dana, Kesy Indraswari, & Agus Salim. (2024). The impact of fiscal spending and financing by Sharia banks on economic growth in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 6(2), 108–117. <https://doi.org/10.18326/ijier.v6i2.2483>
- Safa Adhytia Putri. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 provinsi di pulau sumatera periode 2011-2019. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing.
- Sari, D., & Qibthiyyah, R. M. (2022). Tax Revenue and Income Inequality. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 155–172.

- <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.326>
- Sirilius Seran. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. Deepublish.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam*. Bening Media Publishing.
- Tadjoeddin, M. Z., Yumna, A., Gultom, S. E., Rakhmadi, M. F., Hidayat, M. F., & Suryahadi, A. (2017). Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi. In *SMERU Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/content/ketimpangan-dan-stabilitas-di-indonesia-yang-demokratis-dan-terdesentralisasi>
- Wahyudi, W. (2023). Pengeluaran Pemerintah Provinsi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708–715. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Waty, E., Fajar, M., P, M. A. C., Jam'an, A., Selfiana, S., Ammar, Z., Setyastuti, R., Kartika Devi, E., Al Muhtadin, M., Afiyah, S., & Hansopaheluwakan, S. (2023). *BUKU AJAR PENGANTAR ILMU EKONOMI*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zai, S., Sabailaket, A. S., Ekonomi, F., Medan, U. N., Ekonomi, F., Katolik, U., Cendika, D., & Indonesia, S. (2024). *Analisis peran kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di negara berkembang*. 01, 8–14.
- Zulfikar Bagus Pambuko, N. L. M. (2023). *EVIIEWS: Analisis Data Keuangan untuk Penelitian Mahasiswa Ekonomi*. Unimma Press.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1 Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia Periode 2015-2024



Grafik 2 Penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2015 -2024



Grafik 3 Tingkat Investasi di Indonesia tahun 2015 - 2024



Grafik 4 Pengeluaran Pemerintah Di IndonesiaTahun 2015 – 2024

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Median	Maximum	Minimum	SD
Y	340	0.348488	0.343000	0.477000	0.235000	0.039786
X1	340	10123.22	2472.500	194050.0	259.0000	26539.97
X2	340	11509.15	4912.500	101981.0	9.000000	17142.34

X3	340	29894.73	22082.50	142070.0	2605.000	25708.41
----	-----	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : Penulis, data diolah, (Eviews 12)

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.337516	0.084198
X2	0.337516	1.000000	0.560511
X3	0.084198	0.560511	1.000000

Sumber : Penulis, data diolah (eviews 12) 2025

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035127	0.004240	8.283898	0.0000
X1	-1.873908	1.453607	-0.118909	0.9054
X2	7.083908	1.309907	0.606998	0.5443
X3	-1.757808	1.439707	-1.096346	0.2738

Sumber : Penulis, data diolah (eviews 12) 2025

Tabel 4 Common Effect Model (CEM)E-Views 12, Data Diolah

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/17/25 Time: 22:51

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.341884	0.003316	103.1112	0.0000
X1	-1.214556	8.587508	-1.411262	0.1591
X2	3.675677	1.607607	2.353503	0.0192
X3	1.173107	1.015307	1.162950	0.2457
R-squared	0.042398	Mean dependent var	0.348488	
Adjusted R-squared	0.033848	S.D. dependent var	0.039786	
S.E. of regression	0.039107	Akaike info criterion	-3.633329	
Sum squared resid	0.513868	Schwarz criterion	-3.588282	
Log likelihood	621.6659	Hannan-Quinn criter.	-3.615380	
F-statistic	4.958768	Durbin-Watson stat	0.918088	
Prob(F-statistic)	0.002215			

Tabel 5 Fixed Effect Model (FEM) E-Views 12, Data Diolah

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/17/25 Time: 22:52

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.362112	0.005764	62.82279	0.0000
X1	-3.237608	1.977607	-0.163856	0.8700
X2	-3.671207	1.776507	-2.075337	0.0388
X3	-3.048007	1.956907	-1.560408	0.1197
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.598719	Mean dependent var	0.348488	
Adjusted R-squared	0.551042	S.D. dependent var	0.039786	
S.E. of regression	0.026659	Akaike info criterion	-4.308983	
Sum squared resid	0.215335	Schwarz criterion	-3.892303	
Log likelihood	769.5270	Hannan-Quinn criter.	-4.142954	
F-statistic	12.55784	Durbin-Watson stat	2.191251	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 6 Hasil Output Uji Chow E-Views 12, Data Diolah
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.729356	(33,303)	0.0000
Cross-section Chi-square	295.722304	33	0.0000

Tabel 7 Random Effect Model (REM) E-Views 12, Data Diolah
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/17/25 Time: 22:56
Sample: 2015 2024
Periods included: 10
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 340
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.352376	0.006619	53.23467	0.0000
X1	-4.318708	1.442307	-0.299312	0.7649
X2	-2.354507	1.663307	-1.418743	0.1569
X3	-2.481208	1.516307	-0.164759	0.8692
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.028521	0.5337	
Idiosyncratic random		0.026659	0.4663	
Weighted Statistics				
R-squared	0.009414	Mean dependent var	0.098781	
Adjusted R-squared	0.000570	S.D. dependent var	0.027069	
S.E. of regression	0.027062	Sum squared resid	0.246066	
F-statistic	1.064431	Durbin-Watson stat	1.901913	

Prob(F-statistic)	0.364271		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.055193	Mean dependent var	0.348488
Sum squared resid	0.566237	Durbin-Watson stat	0.826503

Tabel 8. Hasil Output Uji Housman E-Views 12
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.242400	3	0.0041

Tabel 9. Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Probabilitas
C	0.362112	62.82279	0.0000
Penerimaan Pajak	-3.237608	-0.163856	0.8700
Tingkat Investasi	-3.671207	-2.075337	0.0388
Pengeluaran Pemerintah	-3.048007	-1.560408	0.1197
R-squared	0.598719		
Adjuster R-squared	0.551042		
F-Statistik	12.55784		
Prob (F-Statistik)	0,000000		

Sumber : Penulis, data diolah (eviews 12) 2025